

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak Secara Umum

Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa, artiannya bahwa anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya. Pengertian anak dalam kaitannya dengan perilaku delinkuensi anak, biasanya dilakukan dengan berdasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia berapakah seseorang dapat dikategorikan sebagai anak.¹²

Untuk menentukan tentang siapakah yang disebut sebagai anak atau orang yang belum dewasa, hal demikian erat hubungannya dengan adanya tahap-tahap seorang anak dalam mencapai kedewasaan.¹³

Menurut Koesnoen, anak merupakan manusia yang muda mengenai umur dan jiwanya serta muda dalam pengalaman hidupnya, karena anak sangat mudah terpengaruh dengan keadaan sekitarnya.¹⁴ Kemudian menurut Kartono, anak adalah manusia yang masih muda usianya dan masih menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah terpengaruh oleh lingkungannya.¹⁵

¹² Paulus Hadisuprpto. 2010. *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*. Malang, Selaras. Hlm. 11

¹³ Abintoro Prakoso. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta. LaksBang PRESSindo. Hlm. 35.

¹⁴ R.A. Koesnoen, 1964, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, hlm. 120

¹⁵ Kartini, Kartono, 1987, *Gangguan-Gangguan Psikis*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 187.

2. Pengertian Anak dalam Hukum Positif Indonesia

Dalam hukum positif di Indonesia, anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang di bawah umur atau biasa juga disebut sebagai anak yang berada di bawah pengawasan wali.

Pengertian anak pada berbagai peraturan perundang-undangan memiliki beragam pengertian. Hal tersebut merupakan akibat dari setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri dalam mendefinisikan tentang anak.

Menurut ketentuan pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, memberikan pengertian tentang anak atau orang yang belum dewasa yaitu seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin atau menikah. Apabila seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun telah kawin, dan perkawinannya dibubarkan sebelum umurnya genap 21 (dua puluh satu) tahun maka ia tidak lagi bisa disebut sebagai orang yang belum dewasa.¹⁶

Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjabarkan pengertian tentang anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.¹⁷

¹⁶ Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, hlm 7

¹⁷ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang *Hak Asasi Manusia*.

Kemudian di dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹⁸

Selanjutnya di dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁹

3. Perlindungan Hukum Bagi Anak

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari pentingnya anak bagi bangsa dan negara dikemudian hari.

Menurut Arif Gosita, perlindungan anak adalah suatu usaha untuk melindungi anak agar dapat menjalankan hak dan kewajibannya.²⁰

Berdasarkan hasil seminar perlindungan anak oleh prayuna pusat pada tanggal 30 Mei 1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak, yaitu:

- a. Segala daya dan upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
- b. Segala daya dan upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan

¹⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perlindungan Anak*.

²⁰ Arif Gosita. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta. Akademi Pressindo. Hlm. 42

pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah.²¹

Secara garis besar perlindungan anak bagi anak dapat dapat

dibagi menjadi dua pengertian yaitu perlindungan anak bersifat yuridis yang meliputi bidang hukum publik dan bidang hukum keperdataan. Sedangkan pengertian kedua yakni perlindungan yang bersifat non yuridis yakni bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.²²

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa ruang lingkup masalah perlindungan anak sangat luas cakupannya. Dari berbagai dokumen dan pertemuan internasional bahwa kebutuhan terhadap perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat mencakup berbagai aspek, yaitu:

- a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;
- b. Perlindungan anak dalam proses perlindungan;
- c. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial);
- d. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
- e. Perlindungan anak dari segala eksploitasi;
- f. Perlindungan terhadap anak jalanan;
- g. Perlindungan terhadap anak dari akibat peperangan;
- h. Perlindungan terhadap anak di sekitar konflik atau peperangan.²³

Oleh sebab itu masalah perlindungan hukum bagi anak tidak hanya terbatas pada perlindungan hukum pada proses

19. ²¹ Irma Setyowati Sumitro. 1990. *Aspek Perlindungan Anak*. Jakarta. Bumi Aksara. Hlm.

²² *Op.Cit.* Abintoro Prakoso. Hlm. 23-24.

²³ *Ibid.* Hlm. 24-25.

peradilan akan tetapi juga mencakup pada spektrum yang lebih luas.

4. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak

a. Anak tidak dapat berjuang sendiri

Dalam prinsip ini, anak merupakan modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, oleh sebab itu hak-hak seorang anak harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi hak-haknya sendiri karena banyak hal yang mempengaruhi kehidupannya. Sehingga sangat diperlukan peran dari negara dan masyarakat dalam mengusahakan perlindungan hak-hak anak tersebut.²⁴

b. Kepentingan terbaik anak

Kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai prioritas yang tertinggi dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi hak anak akan mengalami banyak kendala. Jika prinsip terbaik untuk anak ini diabaikan oleh negara dan masyarakat, maka akan menciptakan penjahat-penjahat yang lebih buruk di kemudian hari.²⁵

c. Ancangan daur kehidupan

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Mulai

²⁴ *Op.Cit.* Maidin Gultom. Hlm. 47.

²⁵ *Ibid.*

sejak dini seorang anak memerlukan peran keluarga, lembaga pendidikan, lembaga sosial dan keagamaan yang bermutu. Saat anak mencapai usia 15 sampai 18 tahun, ia memasuki masa transisi menuju dunia dewasa. Periode pendek ini dipenuhi dengan resiko karena secara kultural seseorang akan dianggap dewasa dan secara fisik memang telah cukup sempurna untuk menjalankan fungsi reproduksinya sehingga perlindungan hak-hak mendasar oleh orang dewasa sangat diperlukan agar generasi tunas bangsa tetap bermutu.²⁶

d. Lintas sektoral

Dalam prinsip ini, nasib anak sangat bergantung dari berbagai faktor makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, sistem pendidikan yang menekankan hafalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, terutama dari keluarga atau anak itu sendiri.²⁷

5. Prinsip Perlindungan Anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara

²⁶ *Op.Cit.* Abintoro Prakoso. Hlm. 48-49.

²⁷ *Ibid.* Hlm. 49.

Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak, yang meliputi:

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.²⁸

B. Tinjauan Umum Tentang *Juvenile Delinquency*

1. Pengertian *Juvenile Delinquency*

Kenakalan remaja biasa disebut juga sebagai *juvenile delinquency* yang mana Bahasa ini berasal dari Bahasa latin yaitu *juvenils* yang artinya anak-anak dan *delinquere* yang artinya terabaikan yang kemudian diperluas artinya menjadi perbuatan yang salah atau perilaku yang menyimpang.²⁹

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, kenakalan adalah perbuatan tidak baik yang bersifat mengganggu ketenangan orang lain dan tingkah laku yang melanggar norma kehidupan masyarakat.³⁰

Kemudian menurut Simanjuntak bahwa *juvenile delinquency* adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat di mana ia hidup.³¹

²⁸ *Ibid.*

²⁹ B. Simanjuntak, 1984, *Latar Belakang Kenakala Remaja*, Bandung, Alumni, Hlm. 9.

³⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, Hlm. 136.

³¹ Sudarsono, 1991, *Etika Islam tentang Kenakalan Remaja*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, Hlm. 9.

2. Macam-Macam *Juvenile Delinquency*

a. *Delinquency Individual*

Delinkuensi individual merupakan bentuk kekalutan mental dalam diri. Hal ini dikarenakan adanya disintegrasi diri dengan kekacauan batin dan kecenderungan penyimpangan tingkah laku. Hampir seluruh anak delinkuensi individual ini berasal dan besar di lingkungan keluarga yang brutal, diliputi permasalahan keluarga, dan selalu menyia-nyiakan anak-anaknya. Sehingga anak yang besar dilingkungan seperti itu tidak mampu menjalin kedekatan emosional dengan orang lain. Sebagai akibatnya anak tidak mempunyai perasaan kemanusiaan dan hati nuraninya sulit diberi peringatan.³²

b. *Delinquency situasional*

Delinkuensi atau kenakalan jenis ini banyak dipengaruhi oleh stimuli sosial dan tekanan lingkungan sehingga membentuk perilaku buruk pada anak. Kemudian juga kenakalan ini sering dilakukan oleh anak yang normal seperti suka melanggar peraturan, norma sosial dan hukum formal.³³

c. *Delinquency Sistematis*

Delinkuensi sistematis adalah perilaku menyimpang yang telah disistematiskan dalam suatu kelompok atau gang dan

³² Kartini Kartono, 2017, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, Hlm. 46

³³ *Ibid.*

dibenarkan oleh segenap anggota kelompok atau gang tersebut sehingga kejahatannya menjadi terorganisir atau sistematis.³⁴

d. *Delinquency* Kumulatif

Delinkuensi jenis ini merupakan konflik budaya kontroversial yang mana terdapat banyak kelompok sosial yang tidak dapat didamaikan karena selalu terlibat dalam persaingan yang didasari oleh rasa dendam dan benci yang sangat mendalam.³⁵

3. Teori-Teori *Juvenile Delinquency*

a. Teori Biologis

Teori ini menjelaskan bahwa tingkah laku sosiopatik pada anak-anak dapat muncul karena beberapa faktor yakni fisiologis dan struktur jasmaniah yang dibawa sejak lahir.³⁶

b. Teori Psikogenesis

Dalam teori ini menyatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, internalisasi diri yang keliru, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena faktor orang tua sibuk berkarir.³⁷

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Kartini Kartono, 2013, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Hlm 25.

³⁷ *Op.Cit.* Indah Sri Utami, Hlm. 48.

c. Teori Sosiologis

Dalam teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku delinquen pada anak-anak adalah murni sosiologis atau sosial-psikologis anak tersebut.³⁸

d. Teori Subkultural Delikuensi

Dalam teori ini menjelaskan bahwa perilaku jahat adalah sifat-sifat struktul sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal tersebut disebabkan oleh status sosial ekonomi yang rendah. Faktor ini dapat menjadi penyebab terjadinya kejahatan.³⁹

Kesimpulan dasar dari teori ini menyebutkan bahwa perilaku *delinquent* di kalangan remaja, usia muda masyarakat kelas bawah, merupakan gambaran ketidakpuasan terhadap norma dan nilai kelompok kelas menengah. Kondisi demikian mendorong adanya konflik budaya sehingga keterlibatan lebih lanjut anak-anak kelas bawah dalam berperilaku menyimpang yang bersifat tidak bermanfaat, dengki dan jahat.⁴⁰

C. Tinjauan Umum Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Istilah kriminologi ditemukan oleh P. Topinard

³⁸ *Op. Cit.* Kartini Kartono, 2013, Hlm. 25.

³⁹ Ende Hasbi Nassarudin, 2016, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, hlm. 121-122

⁴⁰ *Op. Cit* Indah Sri Utari. Hlm. 100

(1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis. Secara etimologi kriminologi terbagi dari dua suku kata yaitu dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* berarti ilmu pengetahuan.⁴¹ Secara umum kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan atau lebih tegasnya dapat dimaknai sebagai sarana untuk mengetahui sebab dan akibat kejahatan.⁴²

Kriminologi tidak hanya berhenti pada deskripsi tentang peristiwa dan bentuk kejahatan maupun penyebab atau akar dari kejahatan itu sendiri, tetapi juga mengkaji tentang upaya pengendalian kejahatan serta mengkaji reaksi terhadap kejahatan baik formal maupun non formal dan juga baik reaksi pemerintah maupun reaksi seluruh masyarakat.⁴³

Menurut Bonger dalam bukunya Topo Santoso memberikan pengertian kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.⁴⁴

Kemudian Wolfgang, Savitz dan Johnston mendefinisikan kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara

⁴¹ Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa. 2014. *Kriminologi*. Cetakan ke-14 Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hlm 9

⁴² Abdulsyani, 1987. *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya, Bandung, hlm. 6

⁴³ Indah Sri Utari. 2012. *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*. Cetakan ke-2. Yogyakarta. Thafa Media. Hlm. 2

⁴⁴ Dalam Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa. 2014. *Kriminologi*. Cetakan ke-14 Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hlm 9

ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap perbuatan dan pelakunya.⁴⁵

2. Bentuk Pendekatan Dalam Kriminologi

a. Spiritualisme

Spiritualisme memfokuskan perhatiannya pada perbedaan antara kebaikan yang datang dari Tuhan dan keburukan datang dari Setan. Seseorang yang telah melakukan kejahatan akan dipandang sebagai orang yang telah terkena bujukan setan.⁴⁶

b. Naturalisme

Naturalisme merupakan model pendekatan yang ada sejak berabad-abad yang lalu. Perkembangan paham ini muncul dari perkembangan ilmu alam sehingga menyebabkan manusia mencari model penjelasan lain yang lebih rasional dan mampu dibuktikan secara ilmiah.⁴⁷

3. Teori-Teori Kriminologi

a. Teori *Differential Association*

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland, seorang ahli sosiologi Amerika dalam bukunya yang berjudul *Principlep of Criminology* (1934). Sutherland

⁴⁵ *Ibid.* Hlm. 12

⁴⁶ *Ibid.* hlm. 19

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 21

berpandangan bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dari lingkungan sosial.

Terdapat dua versi teori differential association. Versi pertama Sutherland tertuju pada pengaruh konflik budaya, keberantakan sosial, dan differential association. Berdasarkan pengaruh tersebut, kemudian ia menyimpulkan bahwa munculnya teori ini didasarkan pada tiga hal, yaitu:

1. Setiap orang akan menerima dan mengikuti pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan.
2. Kegagalan mengikuti suatu pola tingkah laku (yang seharusnya) akan menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan.
3. Konflik budaya merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan.⁴⁸

Kemudian versi kedua, Sutherland menekankan bahwa semua tingkah laku itu dipelajari, tidak ada yang diturunkan berdasarkan pewarisan orang tua. Artinya bahwa tidak ada tingkah laku jahat yang diturunkan dari kedua orang tua akan tetapi diperoleh dari hasil yang dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab.⁴⁹

b. Teori *Differential Opportunity*

Teori ini dikemukakan oleh Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin dalam bukunya *Delinquency and Opportunity: a Theory of Delinquent Gang* (1960). Pada dasarnya teori ini berorientasi dan membahas penyimpangan di wilayah perkotaan.

⁴⁸ *Op.Cit.* Indah Sri Utari. Hlm. 90-91.

⁴⁹ *Ibid.* Hlm. 91

Penyimpangan tersebut merupakan fungsi perbedaan kesempatan yang dimiliki anak-anak untuk mencapai tujuan legal maupun ilegal.⁵⁰

Cloward dan Ohlin berpandangan bahwa para remaja akan melakukan kejahatan apabila terdapat tekanan-tekanan dan ketegangan-ketengan serta keadaan yang tidak normal. Artiannya bahwa para remaja tidak akan melakukan kejahatan dan akan taat pada norma-norma apabila tidak terdapat tiga hal tersebut di atas yakni tekanan-tekanan, ketegangan-ketengan dan keadaan yang tidak normal.⁵¹

c. Teori Anomi

Pertama kali diperkenalkan oleh Emile Durkheim yang mana istilah ini dipergunakan untuk mendeskripsikan keadaan deregulasi di dalam masyarakat karena tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat pada masyarakat sehingga menyebabkan deviasi.⁵²

d. Teori *Culture Conflict*

Teori kultur konflik pertama kali dikemukakan oleh Thorsten Sellin dalam bukunya yang berjudul *Culture Conflict and Crime*. Kultur konflik merupakan permasalahan nilai sosial, kepentingan dan norma. Konflik norma perilaku dapat timbul

⁵⁰ *Ibid.* Hlm. 102-103

⁵¹ *Ibid.* Hlm. 104.

⁵² *Op.Cit.* Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, Hlm. 59.

karena perbedaan nilai sosial antar kelompok. Begitu juga dengan konflik norma terjadi karena berpindahnya orang desa ke kota.⁵³

e. Teori *Labeling*

Teori ini merupakan teori baru yang muncul pada awal tahun 1960an yang mana untuk mengukur atau mengetahui adanya kejahatan. Teori *labeling* menekankan pada dua hal yaitu permasalahan mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu dicap atau diberi label serta efek dari label tersebut sebagai suatu pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan.

Mengenai permasalahan kejahatan yang dilakukan, FM. Lemert membedakan dalam tiga bentuk penyimpangan yaitu individual deviasi yang diakibatkan oleh psikis dari dalam, situasional deviasi yang diakibatkan oleh tekanan dari keadaan, dan sistematis deviasi sebagai pola-pola perilaku kejahatan yang terorganisir dalam sistem tingkah laku.⁵⁴

Teori-teori tersebut di atas berkaitan erat dengan *juvenile delinquency* yang mana membahas mengenai sebab-sebab terjadinya kenakalan remaja. Sebagaimana dinyatakan oleh Albert Bandura Tokoh utama teori pembelajaran sosial bahwa kenakalan remaja disebabkan oleh bagaimana anak tersebut belajar bertingkah laku melalui peniruan

⁵³ *Op.Cit.* Indah Sri Utari, Hlm. 106

⁵⁴ *Ibid.* Hlm. 108-109.

tingkah laku orang lain terutama dari keluarga, budaya, dan media massa.⁵⁵

D. Teori Penanggulangan Kejahatan

Pada masa silam reaksi penghukuman atas kejahatan sangat berat di mana tujuannya adalah untuk menakut-nakuti masyarakat agar tidak melakukan kejahatan, dan siksaan sebagai balasan atas perbuatan jahat mereka.⁵⁶ Namun pada masa kini usaha-usaha untuk meminimalisir kejahatan lebih diarahkan pada pembinaan serta pemberian efek jera agar pelaku tidak mengulangi kejahatan tersebut.

Menurut G.P. Hoefnagels dalam bukunya Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).⁵⁷

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat di bagi menjadi dua yaitu jalur penal dan non penal.

a) Jalur Penal

Jalur penal adalah upaya yang dilakukan melalui hukum pidana.

Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang menitik beratkan

⁵⁵ *Op.Cit.* Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, Hlm. 55.

⁵⁶ Ninik Widiyanti, Yulius Waskita, 1987, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta, PT. Rineka, Hlm, 23.

⁵⁷ Barda Nawawi Arief, 2011, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, cetakan ke-3, Pustaka Megister, Hlm. 45

pada penegakkan hukum dan pemberian sanksi terhadap kejahatan yang dilakukan.⁵⁸

b) Jalur Non Penal

Upaya penanggulangan non penal biasa disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Sasaran utama dari upaya non penal ini adalah kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau memperluas kejahatan.⁵⁹

E. Tinjauan Umum Tentang Lem

Lem adalah bahan lengket yang dapat merekatkan dua benda atau lebih. Jenis lem sangatlah beragam ada yang aman yaitu dengan menggunakan bahan-bahan alami seperti karet, tepung dan susu. Namun ada juga lem yang menggunakan bahan-bahan kimia yang berbau menyengat.

Beberapa orang menghirup lem yang menggunakan bahan kimia agar dapat merasa nyaman. Hal ini sangat tidak baik karena lem yang menggunakan bahan kimia itu sering beracun sehingga bisa menyebabkan kerusakan pada otak.⁶⁰ jenis lem yang menggunakan bahan berbahaya ini sering disalahgunakan oleh anak di bawah umur untuk membuat mereka mabuk atau kehilangan kesadaran dikarenakan lem ini mengandung zat yang termasuk kategori Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA).

⁵⁸ *Ibid.* Hlm. 46

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Putri Pertiwi Yulianti, 2017, *Bahaya Penyalahgunaan Lem*, dalam corporate.kimiafarmaapotek.co.id. akses 11 Juni 2018

Lem tersebut di atas juga dapat digolongkan sebagai *inhalansia* atau *solven*, yaitu bahan yang mudah menguap yang dihirup. Penggunaan *toluene* yang terdapat dalam lem dapat menimbulkan kerusakan fungsi kecerdasan otak.⁶¹

Zat yang ada dalam lem adalah *Lysergic Acid Diethylamide* (LSD) yaitu zat kimia yang bisa merusak sel-sel otak dan apabila terhirup zat tersebut akan mengubah suasana hati, dan perasaan serta perilaku penggunaanya.⁶²

Menurut sejarahnya, *Lysergic Acid Diethylamide* diciptakan pertama kali oleh Albert Hofmann pada tanggal 16 November 1938. Albert Hofmann adalah seorang ahli kimia yang bekerja untuk Sandoz Pharmaceutical, Basel, Swiss. Ia secara tak sengaja mensintesis LSD selagi mencari formula stimulant darah. Kala itu, ia tak mengetahui bahwa obat ini memiliki kemampuan halusinogen atau mampu dapat menyebabkan halusinasi.⁶³

Dalam bukunya Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna, bahwa LSD merupakan contoh dari Psikotropika Golongan I, yaitu psikotropika yang hanya digunakan untuk ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi amat kuat yang mengakibatkan sindroma ketergantungan.⁶⁴

⁶¹ Juliana Lisa, Nengah Sutrisna. 2013. *Narkotika, Psikotropika dan Gangguan Kejiwaan: Tinjauan Kesehatan dan Hukum*. Yogyakarta. Nuh Medika. Hlm 23.

⁶² Anonim, 2017, *Lagi Tren Menghirup Lem Buat Mabuk*, transsulawesi.com. akses 28 September 2018

⁶³ Anonim, 2017, *LSD Awalnya Diciptakan Untuk Pasien Sakit Jiwa*, www.cnnindonesia.com. Akses 28 September 2018

⁶⁴ *Op.Cit.* Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna, hlm. 6

F. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Polisi berasal dari Bahasa Yunani yaitu Poletia, Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut orang yang menjadi warga negara dari kota Athena, kemudian seiring berjalannya waktu pengertian itu berkembang luas menjadi kota dan dipakai untuk menyebut semua usaha kota dalam konteks bagian dari suatu pemerintahan.⁶⁵ Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Momo Kelana menerangkan bahwa polisi mempunyai dua arti, yakni polisi dalam arti formal mencakup penjelasan organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian, dan dalam arti materil, yakni memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban yang diatur di peraturan perundang-undangan.⁶⁶

2. Fungsi dan Tujuan Kepolisian

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara

⁶⁵ Andi Munawaran, 2004, *Sejarah Singkat POLRI*, www.hukumonline.com, akses 28 September 2018

⁶⁶ Dalam Andi Munawaran, 2004, *Sejarah Singkat POLRI*, www.hukumonline.com, akses 28 September 2018

di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.⁶⁷

Menjalankan fungsi sebagai penegak hukum, polisi wajib memahami asas-asas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan kerjanya yaitu:

- a. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum;
- b. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat;
- c. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat, polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum dikalangan masyarakat;
- d. Asas preventif, yaitu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan kepada masyarakat;
- e. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membelakangi.⁶⁸

Bedasarkan asas-asas hukum tersebut di atas, maka fungsi polisi berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 telah diubah citranya dari yang dulunya antagonis menjadi protagonist.⁶⁹

Kemudian adapun tujuan dari Kepolisian, sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁶⁸ Bisri Ilham, 2004, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 32

⁶⁹ Satjipto Rahardjo, *Polisi Mandiri*, Jakarta, hlm. 33

terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁷⁰

3. Obyek Hukum Kepolisian

Hukum Kepolisian tidak terlepas dari pengertian dari hukum kepolisian itu sendiri yaitu hukum yang mengatur hal-hal mengenai polisi, baik polisi sebagai tugas maupun polisi sebagai organ serta mengatur cara-cara bagaimana organ tersebut melaksanakan tugasnya.⁷¹

Adapun obyek dari hukum kepolisian yaitu, tugas polisi sebagai obyek maka hal tersebut diatur dan ditentukan oleh hukum kepolisian. Sedang hubungan polisi dan tugasnya yaitu berupa pelaksanaan. Artinya bahwa hukum kepolisian mengatur tentang bagaimana kepolisian melaksanakan tugas dan wewenangnya.⁷²

4. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Dalam hal menjalankan tugas kepolisian, diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁷³

Kemudian dalam pasal 14 menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

⁷⁰ *Op.Cit.*

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Farouk Muhammad, 2003, *Menuju Reformasi Polri*, Restu Agung, Jakarta, hlm. 76

⁷³ *Op.Cit.* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

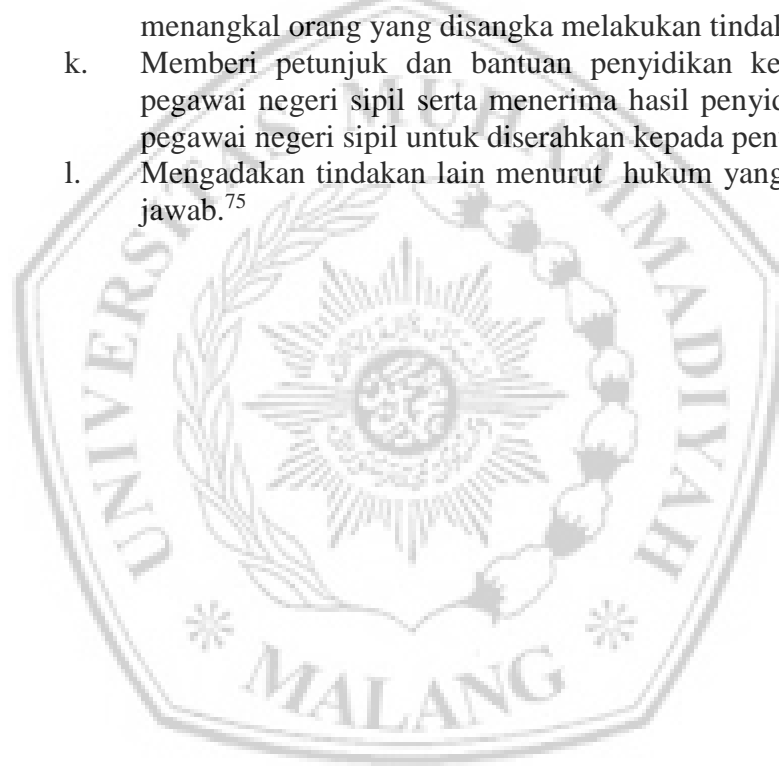
- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik, pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁷⁴

Selain mempunyai tugas pokok yang harus dilaksanakan, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga memiliki wewenang yang mana hal tersebut diatur pada pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;

⁷⁴ *Ibid.*

- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan pemeriksaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.⁷⁵



⁷⁵ *Ibid.*